

Analisis Ketersediaan Obat dengan Pemberlakuan E Catalogue di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2018

Kurota Aini¹, Shirly Kumala², Prih Sarnianto³

^{1,2,3} Magister Ilmu Kefarmasian, Jurusan Farmasi Rumah Sakit Universitas Pancasila

Email: qurotaaini70@gmail.com¹, fskumala@univpancasila.ac.id², prih1488@gmail.com³

Abstrak

Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjangkau, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menteri Kesehatan melakukan pengendalian dan pengawasan dengan Pengadaan obat melalui e-katalog secara on-line. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dan pengaruhnya terhadap ketersediaan obat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptik-analitik yang dilakukan di 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pesawaran). Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 5 responden di masing-masing kabupaten dan data kuantitatif berupa pengkajian data Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dari masing-masing kabupaten, data pengadaan obat yang dilakukan melalui e-Catalogue dan dokumen lain yang sudah diarsipkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juli 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan obat dengan e catalogue masih ditemukan hambatan/kendala yaitu masih ada 4 kabupaten yang belum bisa memenuhi kebutuhan obatnya sesuai dengan nilai obat yang ada dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan ada 7 item obat yang dipesan oleh 6 Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Lampung yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia (cutoff). Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap responden penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengadaan obat berdasarkan e catalogue di 6 kabupaten di Provinsi Lampung dapat menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat karena daerah akan mendapatkan obat dengan pilihan terbaik, efisien dari segi biaya dan waktu, lebih aman dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Kata Kunci : *Ketersediaan Obat, E Catalogue, Jaminan Kesehatan Nasional, Rencana Kebutuhan Obat.*

Abstract

In the effort of health services, the availability of drugs in complete types, sufficient quantities, guaranteed efficacy, safe, effective and quality, at affordable prices and easily accessible is the target that must be achieved. In the era of the National Health Insurance (JKN), the Minister of Health controlled and supervised the procurement of drugs through e-catalogue on-line. The purpose of this study was to determine the utilization of drug procurement based on e-catalogue and its effect on drug availability. This research is a descriptive-analytic study conducted in 6 regencies / cities (West Lampung Regency, Pesisir Barat Regency, Tulang Bawang Barat Regency, North Lampung Regency, East Lampung Regency, and Pesawaran Regency). Data collected in the form of qualitative data through

in-depth interviews with 5 respondents in each district and quantitative data in the form of a review of the Drug Needs Plan (RKO) data from each district, data on drug procurement conducted through e-Catalogue and other documents that have been archived by the District Health Office. The study was conducted from April to July 2019. The results showed that in the implementation of procurement of drugs with e catalogue still found obstacles / constraints that there are still 4 districts that have not been able to meet their drug needs in accordance with the value of drugs that are in the Drug Needs Plan (RKO) and there are 7 drug items ordered by 6 Dinas Health District in Lampung Province which cannot be fulfilled by the provider (cutoff). But overall based on the results of in-depth interviews with research respondents, it can be concluded that the application of procurement of drugs based on e catalogue in 6 districts in Lampung Province can guarantee transparency / openness, effectiveness and efficiency of the drug procurement process because the regions will get drugs with the best choice, efficient in terms of cost and time, safer and easier the implementation of procurement activities.

Keywords : *Availability Of Drugs, E Catalogue, National Health Insurance, Drug Needs Plan.*

PENDAHULUAN

Negara mengemban amanat dan kewajiban untuk mewujudkan masyarakat sehat, karena kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi unsur penting kesejahteraan. Kesehatan adalah salah satu unsur penting bahkan sangat strategis dalam upaya pembangunan manusia. Mengingat pentingnya fungsi obat tersebut pengelolaan obat haruslah dilakukan secara efektif dan efisien agar ketersediaannya terjaga. Pengelolaan yang tepat akan menjamin obat dari aspek mutu, jumlah, jenis dan ketersediaan, sehingga obat ada pada saat dibutuhkan.

Konsep kebijakan pelayanan kesehatan era JKN adalah “managed care” yaitu suatu sistem dimana pelayanan kesehatan dan pembiayaannya diselenggarakan dan tersinkronisasi dalam kerangka kendali mutu dan biaya, sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dengan biaya yang efisien.

Sistem pengadaan obat berdasarkan e-catalogue merupakan sistem pengadaan obat yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue) dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Berdasarkan e-catalogue merupakan regulasi pendukung yang menjadi pedoman dilaksanakannya pengadaan obat berdasarkan e-catalogue.

Pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) sejak diinisiasi tahun 2013, belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh semua Satker dan Faskes dibidang kesehatan. Masih terdapat kendala akses e-purchasing obat bagi beberapa industri farmasi dan Satker. Laporan keluhan dari Satker bahwa masih ada industri farmasi yang sampai saat ini belum melayani pesanan Satker dengan alasan jumlah stok terbatas, belum mendapatkan bahan baku, dan atau diminta untuk menambahkan produk lain untuk menutup biaya distribusi.

Provinsi Lampung terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah sebesar 35.288,35 km². Jumlah penduduk pada tahun 2018 tercatat sebesar 8,37 juta jiwa. Ini menempatkan Lampung sebagai provinsi kedua di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Sumatera Utara.

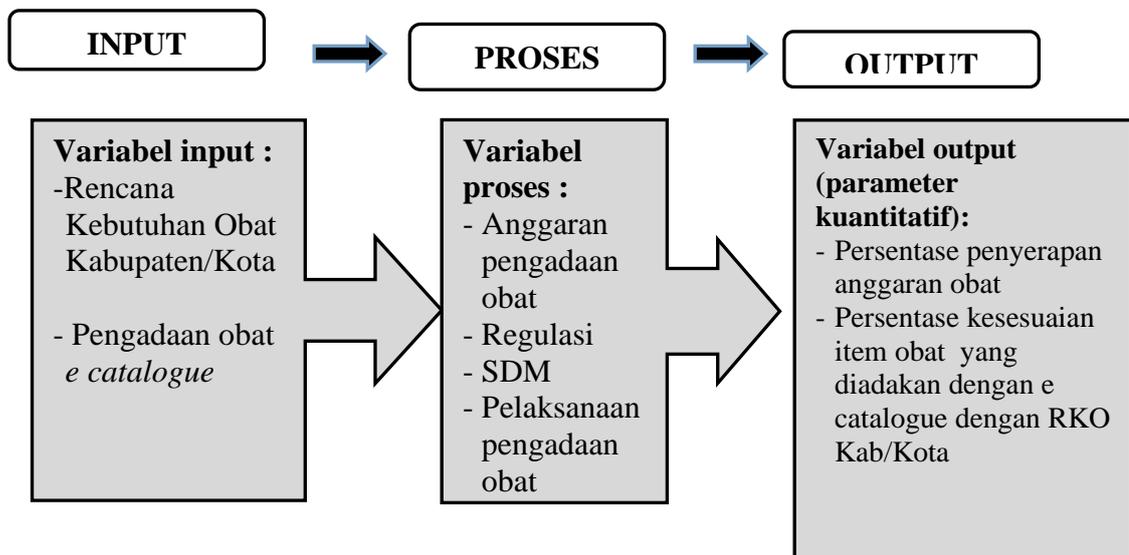
Ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan harus terjaga dengan baik, memenuhi kriteria jenis dan jumlah yang mencukupi kebutuhan layanan kesehatan. Terjadinya gangguan dalam ketersediaan obat akan menyebabkan pasien tidak mendapatkan pengobatan sesuai indikasi medis. Hal ini akan berdampak pada masa penyembuhan yang menjadi lebih lama, sehingga meningkatkan biaya pelayanan kesehatan serta menurunkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan data persentase rata-rata ketersediaan obat di 15 kabupaten/kota se Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2018 masih ada kabupaten/kota yang persentase ketersediaan obatnya

rendah (dibawah 80%) walaupun beberapa kabupaten/kota memiliki persentase ketersediaan yang tinggi (diatas 80%).

METODE

Metode penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kuantitatif yang dilakukan di 6 Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini dijabarkan secara sistematis



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Data Kualitatif

Table 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan (%)				Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	
1	Bandar Lampung	75	79	80	91	81.25
2	Pesawaran	53	65	42.3	100	65.08
3	Pringsewu	91	85	100	83	89.75
4	Metro	80	73	100	100	88.25
5	Lampung Tengah	77	85	91	92	86.25
6	Lampung Selatan	66	61	68	71	66.50
7	Lampung Timur	98	100	100	96	98.50
8	Tanggamus	67	70	64	76	69.25
9	Lampung Utara	51	57	64	87	64.75
10	Tulang Bawang	90	89	100	100	94.75
11	Tulang Bawang Barat	100	100	100	96	99.00
12	Mesuji	57	63	70	100	72.50
13	Way Kanan	81	87	84	97	87.25
14	Pesisir Barat	73	67	55	84	69.75
15	Lampung Barat	96	97	100	93	96.50

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

: Kabupaten dengan tingkat ketersediaan tertinggi

[Yellow Box] : Kabupaten dengan tingkat ketersediaan terendah

Kemudian dari 6 kabupaten tersebut dipilih masing-masing 2 puskesmas dengan kriteria ketersediaan tertinggi dan terendah. Berikut daftar puskesmas dari masing-masing 6 kabupaten yang dijadikan sampel penelitian :

No	Kabupaten	Nama Puskesmas
1	Pesawaran	Gedong Tataan Bernung
2	Lampung Timur	Purbolinggo Pekalongan
3	Lampung Utara	Kotabumi I Kalibalangan
4	Tulang Bawang Barat	Daya Murni Pancaragan Jaya
5	Pesisir Barat	Karya Penggawa Kruai
6	Lampung Barat	Kenali Sekincau

Berdasarkan Hasil Wawancara

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3
Bagaimana ketersediaan SDM dalam penyusunan RKO disini?	Ketersediaan SDM yang menyusun RKO masih kurang, hanya 1 orang yang juga mengerjakan tugas-tugas program yang lain.... Dan menghitungnya kurang tepat..kadang jumlah kebutuhannya dilebihkan 50%..."	Kurangnya pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk proses perencanaan pengadaan obat yang tepat akibat belum dilakukannya pelatihan petugas obat di puskesmas	Keterbatasan SDM khususnya tenaga Apoteker menjadi kendala terhambatnya pembentukan tim perencanaan kebutuhan obat terpadu. Buku pedoman teknis pengadaan obat publik dan perencanaan dan perbekalan kesehatan dasar
Bagaimana system pengadaan e-catalogue di sini?Apakah sudah sesuai dgn ketentuan yang ditetapkan ?	Pengadaan obat e catalogue lebih aman karena sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Karena pengadaan obat e catalogue sesuai juknis pengadaan obat DAK yang harus menerapkan metode catalogue, mudah, boleh menyebutkan merk dan waktunya lebih singkat	Pengadaan obat saat ini lebih aman dan mudah karena sudah sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018

SIMPULAN

Penerapan pengadaan obat berdasarkan e catalogue di 6 kabupaten di Provinsi Lampung dapat menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat karena daerah akan mendapatkan obat dengan pilihan terbaik, efisien dari segi biaya dan waktu, lebih aman dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengadaan.

Pelaksanaan penerapan catalogue dalam memenuhi kebutuhan obat di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung masih ditemukan hambatan/kendala yaitu realisasi Anggaran Pengadaan Obat. Ini berarti bahwa Kabupaten tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan obatnya sesuai dengan nilai obat yang ada dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO). Sedangkan Berdasarkan hasil penelitian ternyata ada beberapa item obat yang di cutoff. Obat-obat yang cut off ini jika kejadiannya di akhir tahun akan berdampak terhadap ketersediaan obat di kabupaten/kota karena sisa anggaran yang ada akibat cut off tidak bisa dialihkan untuk memesan/membeli obat yang lain karena tidak cukup waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI, 2016, Paparan Direktur Tatakelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat kesehatan Kemenkes RI, Palembang : Kementerian Kesehatan ; 2016.
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. 3 (2014). doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Ningsih, A., Fudholi, A., Sumarni. Hubungan Penerapan Elektronik Katalog terhadap Efisiensi Pengadaan dan Ketersediaan Obat, J Manajemen dan Pelayanan Farmasi. 2016;5 (4) : 233-240. Management Sciences for Health. *MDS-3: Managing Access to Medicines and Health Technologies*, Airlington, VA : Management Sciences for Health, Inc. 2012.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Cetakan Kedua. Jakarta : Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan ; 2006.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1121/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2008.
- Bachri, B. S. Meyakinkan Validitas Data Melalui Tr Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Tekno. Pendidik*. **10**, 46–62 (2010).
- Sutriatmoko, Satibi, Puspandari, D.A. Analisis penerapan E-Procurement obat dengan Prosedur E-Purchasing berdasar E-Catalogue di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. J Manajemen dan Pelayanan Farmasi. 2015;5 (4) : 268-274.